

LSM INTERNASIONAL DAN DILEMA PELESTARIAN DI HUTAN HARAPAN PROVINSI JAMBI

Adirini Pujayanti*

Abstract

This paper discusses the environmental conservation efforts by international NGOs in Indonesia. Through a global partnership mandated by the Earth Summit in 1992, all parties are expected to involve a full role to play as well as to preserve the environment. Deforestation in the tropical forests in Sumatra has attracted global great attention. This condition has encouraged international NGOs to carry out conservation in the area of the Hope Forest in the Province of Jambi which has a fairly high level of biodiversity. However, this effort has gained pros and cons.

Keywords: International NGOs, environmental conservation, hope forest

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang upaya pelestarian lingkungan oleh LSM internasional di Indonesia. Melalui kemitraan global yang diamanatkan oleh KTT Bumi di tahun 1992, semua pihak diharapkan dapat berperan penuh untuk berperan serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Deforestasi kawasan hutan tropis di Pulau Sumatera telah menjadi perhatian dunia. Kondisi tersebut mendorong LSM internasional untuk melakukan konservasi di kawasan Hutan Harapan Provinsi Jambi yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati cukup tinggi. Upaya menjadikan kawasan Hutan Harapan sebagai kawasan konservasi ekosistem berhasil dilaksanakan namun mendapatkan tanggapan pro dan kontra.

Kata Kunci: LSM internasional, pelestarian lingkungan, hutan harapan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah Perang Dingin, isu lingkungan merupakan salah satu topik yang menjadi perhatian penting dalam hubungan internasional. Isu lingkungan hidup menjadi isu penting ketiga dalam hubungan internasional, setelah isu keamanan internasional dan ekonomi global.¹ Dunia semakin menyadari bahwa eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan akan menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang berdampak negatif bagi kelangsungan kehidupan manusia di bumi.

Oleh karena itu pembahasan isu lingkungan dan pembangunan secara bersama-sama antara negara berkembang dan negara maju menjadi tidak terhindarkan. Laju pertumbuhan penduduk dunia diyakini telah menciptakan aktivitas sosial dan ekonomi yang mengancam kelestarian lingkungan hidup. Terjadi peningkatan kebutuhan pangan, pemukiman, lapangan

kerja, kesehatan, pendidikan, energi yang pada akhirnya akan berdampak pada degradasi lingkungan hidup. Semakin besar intensitas eksploitasi sumber daya alam akan semakin besar pula dampaknya terhadap degradasi kualitas lingkungan.

Indonesia adalah negara mega-keanekaragaman hayati (*megabiodiversity country*). Hutan tropis Indonesia menjadi paru-paru dunia dan mengandung keanekaragaman hayati luar biasa yang sangat potensial untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umat manusia. Kekayaan keanekaragaman hayati tersebut belum sepenuhnya termanfaatkan, namun banyak yang telah berada diambang kepunahan. Indonesia banyak mendapat kendala dalam upaya perlindungan keanekaragaman hayati karena wilayahnya yang luas dan terdiri dari banyak pulau, sedangkan sumber daya baik manusia, dana dan waktu untuk upaya tersebut sangat terbatas.

* Penulis adalah peneliti madya bidang masalah-masalah hubungan internasional di Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI.

¹ Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, (terjemahan Dadan Suryadipura), Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2005, hal.324

Indonesia bekerjasama dengan banyak pihak dalam upaya melindungi keanekaragaman hayati ini, termasuk dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Kerjasama tersebut tidak selalu berjalan dengan baik, seperti yang terjadi saat pemerintah Indonesia menghentikan kerjasama dengan Gibbon Foundation di tahun 2006.² Sebaliknya tidak sedikit pula kerjasama yang berlangsung baik dan terus berlanjut hingga saat ini seperti yang terjadi di Hutan Harapan Provinsi Jambi. Keberhasilan Hutan Harapan sebagai pionir konservasi ekosistem menjadi contoh bagi organisasi lainnya untuk melakukan proyek-proyek sejenis.

Hutan Harapan menjadi kawasan prioritas global untuk habitat hutan yang mewakili 20 persen hutan dataran rendah yang tersisa di Sumatera. Sebagian besar kawasan di Hutan Harapan merupakan hutan alam sekunder bernilai tinggi yang tengah dipulihkan. Terdapat banyak fauna langka serta kekayaan flora yang sudah sulit ditemukan di tempat lain, seperti berbagai spesies burung rangkong. Selain itu, Hutan Harapan menjadi tempat tinggal bagi suku asli Jambi yaitu Suku Anak Dalam Batin Sembilan yang menggantungkan hidupnya dari hasil hutan.

Kawasan yang berada di dua provinsi yaitu di Sumatera Selatan seluas 52.170 hektare dan Jambi dengan luas 46.385 hektare ini merupakan lahan bekas kawasan pengusahaan hutan produksi yang telah ditinggalkan. Atas inisiatif LSM internasional *The Royal Society for the Protection of Birds* (RSPB) dan *BirdLife International* bersama dengan LSM Burung Indonesia bekas lahan hutan produksi tersebut kemudian direstorasi untuk dihutankan kembali demi mempertahankan keanekaragaman

hayatinya yang tinggi. Program restorasi Hutan Harapan yang dimulai sejak 2002 ini merupakan yang pertama di Indonesia. Bila restorasi Hutan Harapan berhasil, akan menjadi model positif yang dapat dikembangkan dalam pengelolaan hutan alam di Indonesia. Keberhasilan restorasi Hutan Harapan juga akan memperbaiki citra Indonesia di mata internasional yang dipandang sebagai salah satu negara penghancur hutan tropis.³

Upaya restorasi Hutan Harapan yang dipelopori oleh beberapa LSM internasional tersebut dianggap efektif untuk pemulihan kawasan. Hutan Harapan telah menjadi kawasan konsesi restorasi ekosistem di hutan produksi yang pertama di Indonesia dan menjadi pusat riset internasional untuk hutan dataran rendah kering. Namun dalam pelaksanaan selanjutnya, upaya yang telah dilakukan oleh LSM internasional tersebut memicu munculnya konflik dengan masyarakat lokal yang selama ini hidup di kawasan tersebut. Kelestarian Hutan Harapan saat ini menghadapi ancaman perambahan dan pembalakan liar yang diperkirakan sudah mencapai 19.000 hektare atau sekitar 20 persen dari luas kawasan.⁴

II. PERMASALAHAN

Dalam Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED) atau dikenal sebagai KTT Bumi yang diadakan di Brasil tahun 1992, berhasil dicapai kesepakatan global yang menegaskan pentingnya menjaga kelestarian bumi untuk kepentingan hidup bersama seluruh umat manusia. Salah satu upaya menjaga kelestarian bumi dilakukan melalui konservasi alam yang banyak digiatkan oleh LSM internasional yang bergerak di bidang penyelamatan lingkungan. Peran LSM sebagai salah satu aktor internasional berpengaruh pada

² Ditjen PHKA memutuskan hubungan kerjasama dengan Gibbon Foundation yang dituangkan dalam surat Direktur Jenderal PHKA No. S 417/IV-KKH/2006 tanggal 19 April 2006 karena Gibbon Foundation dinilai bertindak melampaui batas-batas ruang lingkup kerjasama dan melakukan tindakan di luar wewenangnya sebagai mitra kerja, seperti melakukan fungsi pengawasan terhadap Ditjen PHKA. SIARAN PERS No.: S.287/II/PIK-1/2006, <http://www.dephut.go.id/index.php/news/details/1812>, diakses 19 Juni 2014

³ Tanggapan PERSAKI dalam 'Kampanye Hitam' Indonesia Sebagai Perusak Hutan Terbesar di Dunia, 05-06-2007, <http://www.dephut.go.id/index.php/news/details/2668>, diakses 19 Juni 2014.

⁴ Hutan harapan jadi pusat riset internasional, 23 Oktober 2013, <http://www.antaraneews.com/berita/401719/hutan-harapan-jadi-pusat-riset-internasional>, diakses 19 Juni 2014.

upaya penyelamatan kelestarian lingkungan secara global. Pada umumnya LSM internasional tersebut bekerja dengan prinsip konservasi klasik yang berakar di Barat yang menegaskan masyarakat adat atau masyarakat setempat dari kawasan konservasi. Pendukung konservasi ini berupaya agar prinsip tersebut diadaptasikan di semua kawasan. Sebagai akibatnya akses tradisional masyarakat setempat ke kawasan konservasi harus dihentikan. Hal ini yang menyebabkan adanya pro dan kontra terhadap upaya konservasi. Dari permasalahan tersebut muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah LSM internasional berperan dalam upaya konservasi di Hutan Harapan Provinsi Jambi?
2. Apakah peran aktor-aktor internasional dalam konservasi di Hutan Harapan Provinsi Jambi tersebut efektif?

III. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Hasil Penelitian ini dapat membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah dalam mengelola masalah-masalah lingkungan hidup, serta menyiapkan berbagai peraturan perundang-undangan pendukung terkait. Laporan penelitian ini juga sangat berguna dalam membantu anggota DPR dalam mengkritisi kebijakan pemerintah di bidang kelestarian lingkungan hidup dan politik luar negeri. Dengan demikian, laporan ini dapat dimanfaatkan untuk anggota Komisi I, Komisi IV dan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP). Secara khusus, laporan ini dapat dikontribusikan bagi Panitia Khusus RUU yang terkait masalah-masalah terkait konservasi lingkungan hidup.

IV. KERANGKA PEMIKIRAN

Keanekaragaman hayati atau sering disebut sebagai biodiversity (*biological diversity*) terjadi sebagai hasil dari miliaran tahun proses evolusi. *World Wildlife Fund* (1989) mendefinisikan keanekaragaman hayati sebagai kekayaan hidup di bumi berupa jutaan tumbuhan, hewan dan mikro organisme, genetika yang dikandungnya,

dan ekosistem yang dibangunnya menjadi lingkungan hidup.⁵ Setiap tingkatan biologi dalam keanekaragaman hayati mempunyai arti penting sebagai penyediaan sumber daya dan alternatifnya bagi keberlangsungan hidup umat manusia.

Secara global keanekaragaman hayati semakin berkurang akibat rusaknya kelestarian lingkungan. Kesadaran bahwa menjaga kelestarian lingkungan hidup berarti menjaga kehidupan manusia, menjadikan isu lingkungan hidup menjadi menjadi topik dalam berbagai fora internasional dan turut mempengaruhi interaksi aktor-aktor hubungan internasional. Dampak negatif dari degradasi lingkungan hidup bersifat transnasional, kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan yang terjadi di satu negara dapat berdampak negatif ke negara lain.⁶ Oleh sebab itu setiap pihak merasa terlibat dengan isu ini karena masalah lingkungan hidup merupakan masalah global yang terkait kepentingan bersama seluruh umat manusia. Sebagai implikasi dari globalisasi, negara tidak lagi menjadi menjadi otonom dalam melakukan pengambilan keputusan tanpa memperhatikan aktor-aktor lain di luar dirinya, baik dalam konteks nasional, regional dan bahkan global.⁷ Dalam isu lingkungan hidup, negara tidak bisa mengabaikan kekuatan global dan tekanan-tekanan aktor non-negara, dimana salah satunya adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) internasional. LSM yang bergerak secara global semakin memperoleh pengakuan sebagai aktor dalam hubungan internasional sejak berakhirnya Perang Dunia II. Menurut Daniel S.Papp, saat ini negara

⁵ Jana Supriatna, *Melestarikan Alam Indonesia*, Jakarta; Yayasan Obor, 2008, h.3, lihat pula *Biologi Konservasi*, Mochamad Indrawan dkk, Jakarta; Yayasan Obor, 2007, h.15

⁶ John Baylis dan Steve Smith, *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. UK; Oxford University Press, 1999, h.314-315 dalam Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Hubungan Internasional*, Bandung; Remaja Rosdakarya, 2005, h.144.

⁷ David Held, *Democracy and the Global Order*, California: Stanford University Press, 1995, h.398.

tidak dapat mengabaikan kritik dan saran LSM internasional karena LSM juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan di seluruh dunia.⁸ Pengambilan keputusan secara internasional sangat dipengaruhi oleh interaksi dan proses informasi diantara para aktornya. Interaksi semua aktor internasional tersebut membentuk sistem internasional. Secara bersamaan, sistem internasional mempengaruhi cara tindakan aktor dan cara mereka melihat diri mereka sendiri dan pihak lain. Berbagai aktor internasional dan interaksi mereka menciptakan sebuah ruang gema yang luas dan dinamis. Oleh sebab itu interaksi dalam hubungan internasional saat ini tidak hanya terjadi antar negara, tetapi juga antara negara dengan LSM internasional.

Dalam masalah pelestarian lingkungan global peran LSM tidak dapat diabaikan. Cara pandang LSM internasional yang bergerak di bidang lingkungan hidup dipengaruhi oleh pendirian etis universalis yang dikenal sebagai kosmopolitanisme.⁹ Dasar dari pandangan ini menyatakan bahwa manusia adalah warga dunia yang hidup bersama sebagai bagian dari *global citizen*. Banyaknya interaksi antar individu maupun komunitas memicu adanya rasa kebersamaan dan adanya toleransi untuk dapat hidup berdampingan sebagai sebuah warga dunia.¹⁰ Menurut pandangan ini, keterlibatan dan tanggung jawab etis untuk menjaga kelestarian lingkungan bukan hanya berlaku bagi komunitas tertentu, tetapi berlaku dimana saja dan bagi semua pelaku moral yang mampu memikulnya. Manusia harus berhenti merusak alam karena hal tersebut berarti merusak kehidupan orang lain.

Melalui kemitraan global yang diamanatkan oleh KTT Bumi 1992, semua pihak diharapkan dapat berperan penuh untuk memperbaiki

lingkungan hidup. Semua pihak yang dimaksud disini termasuk organisasi internasional dan LSM. Mereka merupakan aktor-aktor internasional yang berpengaruh dalam politik internasional. Dalam pelaksanaannya dukungan LSM internasional terhadap isu lingkungan hidup tidak selalu sejalan dengan pihak-pihak terkait lainnya. Cara pandang terhadap lingkungan dapat berbeda karena dipengaruhi kondisi sosial politik, latar belakang sejarah maupun cara hidup yang dianut LSM tersebut. Sebagai konsekuensi, dalam melaksanakan tujuannya LSM dapat berbeda pandangan dan terpisah bebas dari kendali pemerintah.¹¹

Pemahaman upaya pelestarian lingkungan melalui cara konservasi berasal dari Barat. Hal ini berawal dari Inggris yang telah memiliki tradisi pelestarian alam yang kuat sejak masa Pemerintahan William I tahun 1084. Di masa pemerintahannya Inggris telah memiliki perencanaan nasional bagi pengelolaan sumberdaya yang didasarkan pada inventarisasi yang akurat dan kebutuhan untuk melakukan tindakan perlindungan untuk menjamin agar sumberdaya alam tersebut tidak habis. Tradisi pelestarian alam Inggris tersebut kemudian menyebar keseluruh dunia sebagai inti dari konservasi.¹²

Upaya konservasi berkembang tidak hanya sebatas pengetahuan untuk pengawetan, perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan, tetapi lebih luas lagi sebagai tekanan kekuasaan yang diterapkan ke seluruh dunia. Konservasi diperjuangkan menjadi konvensi global dan ditransformasikan menjadi kebijakan dan tindakan-tindakan strategis sistem pengetahuan/kekuasaan yang mendunia (*global environmental discourse*).¹³ Pemahaman konservasi yang dibawa dari Barat sangat dipengaruhi pemikiran kaum konservasionis yang memandang alam sesuatu yang bersifat *arcadia* dimana keindahan

⁸ Daniel S.Papp, *Contemporary International Relations – Frameworks for Understanding*, Boston; Allyn and Bacon, 1997, h.109 - 150

⁹ Robert Attfield, *Etika Lingkungan Global*, (terjemahan Saut Pasaribu) Bantul; Kreasi Wacana, 2010, h. 32-33.

¹⁰ Derek Heater, *Historical Pattern, dalam World Citizenship: Cosmopolitan Thinking and Its Opponents*. London: Continuum, 2002. h. 26

¹¹ Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction To International Relations*, 4th Edition, New York; Oxford University Press, h.104-105.

¹² Marcus Colchester, *Menyelamatkan Alam – Penduduk asli Kawasan Perlindungan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati*, Jakarta, WGCOP – Walhi, 2009.

¹³ *Ibid.*, h. iii.

dan karakter alam harus dilestarikan secara natural dan dijauhkan dari intervensi atau gangguan manusia.¹⁴ Adanya penduduk pada kawasan yang dilindungi merupakan ancaman bagi kelestarian sumberdaya hutan dan konflik kepentingan di kawasan yang justru harus dilindungi. Padahal mayoritas kawasan konservasi di luar Eropa sudah berpenghuni, sehingga konservasi dipandang sebagai sistem kekuasaan yang tidak adil dan diskriminatif.

Sebagai reaksi atas adanya ketidakadilan lingkungan tersebut muncul gerakan sosial ekopopulisme yang menuntut keadilan lingkungan (*environmental justice*). Gerakan ekopopulis ini memperjuangkan keadilan untuk masyarakat adat yang hak-hak tradisionalnya untuk akses sumberdaya alam tidak diakui oleh aktor-aktor eksternal yang berkedudukan jauh dari batas-batas komunitas kawasan konservasi. Hal ini menjadi tantangan terhadap konservasi keanekaragaman hayati yang dipandang tidak adil terhadap masyarakat adat, kebijakan *top down* dan terkait dengan kepentingan kapitalisme global (*bioprospect*).¹⁵

V. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis peran LSM internasional terhadap upaya perlindungan keanekaragaman hayati di Indonesia. Data primer merupakan hasil-hasil pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap beberapa informan yang dipilih secara sengaja. Sedangkan data sekunder adalah bahan-bahan tertulis yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Sifat penelitian ini deskriptif analitis karena melukiskan atau menggambarkan jawaban secara mendalam atas permasalahan diatas.

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Kunjungan lapangan dilakukan di Hutan Harapan Provinsi Jambi. Kawasan hutan ini dipilih karena berhasil menjadi pionir bagi pelaksanaan konservasi ekosistem dan

menjadi contoh bagi negara lain atas dukungan LSM internasional. Hutan ini terletak di dua provinsi, yaitu di Kabupaten Batanghari, Jambi dan sisanya di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Penelitian ini mengambil lokasi Hutan Harapan yang berada di Provinsi Jambi. Penelitian lapangan ke Provinsi Jambi dilakukan pada minggu keempat Juli 2011.

B. Cara Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

1. data primer yang meliputi data tentang kebijakan pemerintah pusat terkait kebijakan luar negeri, restorasi ekosistem, PT. REKI sebagai pelaksana restorasi ekosistem Hutan Harapan, peran daerah (provinsi maupun kabupaten/kota) dalam pelaksanaan kebijakan restorasi ekosistem dan LSM
2. data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan ataupun dokumen yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri, restorasi ekosistem, termasuk hasil-hasil penelitian ataupun artikel-artikel di media massa terkait hal itu.

Data-data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan metode:

- a. Studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan segala informasi, data, dan keterangan yang berasal dari data dokumenter, baik berupa buku, risalah, transkrip, dokumen, maupun bahan-bahan tertulis lainnya yang sudah tersedia yang berkaitan dengan kebijakan restorasi ekosistem.
- b. Observasi langsung, yaitu dengan melakukan kunjungan lapangan ke daerah penelitian.
- c. Wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang berkepentingan

Adapun narasumber dalam FGD atau yang diwawancarai adalah :

- Di pemerintah pusat: Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kehutanan.
- Di pemerintah daerah: Bappeda Provinsi Jambi.

¹⁴ *Ibid.*, h.iv

¹⁵ *Ibid.*, h.vi.

- LSM Burung Indonesia (penggagas Hutan Harapan).
- PT. REKI (pengelola Hutan Harapan).

VI. PEMBAHASAN

A. Keanekaragaman Hayati Hutan Harapan

Kawasan hutan dunia yang semakin berkurang membawa pengaruh pada kian punahnya keanekaragaman hayati. Kegiatan manusia merubah lingkungan alami hutan menjadi lahan pertanian, perkebunan, hingga pembangunan infrastruktur untuk kegiatan industri, merupakan serangkaian aktifitas yang menyebabkan berkurang bahkan hilangnya hutan. Meningkatnya tekanan terhadap kehidupan liar dan ekosistem alami ini disebabkan bertambahnya jumlah penduduk serta kebijakan ekonomi dan pembangunan yang tidak berkelanjutan.

Sebagai contoh hutan hujan tropis di Indonesia yang merupakan kawasan kaya keanekaragaman hayati yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Laju deforestasi telah menurunkan peringkat Indonesia di dunia internasional dalam hal keanekaragaman hayati. Indonesia yang sebelumnya tercatat sebagai urutan kedua setelah Brasil dalam hal keanekaragaman hayati, sejak tahun 2013 berada dalam urutan tiga besar setelah Brazil dan Kongo.¹⁶

Kekayaan keanekaragaman hayati (biodiversity) pada hutan tropis yang dimiliki Indonesia merupakan *political leverage* yang dapat dimanfaatkan dalam diplomasi dan politik luar negeri. Kekayaan sumber daya alam baik di darat maupun laut juga mempengaruhi Indonesia dalam mengambil berbagai inisiatif pada tingkat regional maupun internasional baik dengan maksud melindungi, mengkonservasi maupun dalam penggunaannya yang berkelanjutan. Namun saat ini Indonesia berada di *epicenter* krisis penggundulan hutan global. Indonesia telah kehilangan sekitar 20 juta hektar hutan dari tahun 1985 sampai 1997. Sejak itu, para pakar yakin bahwa 5 juta hektar lainnya juga

telah punah, akibat merajalelanya penebangan kayu ilegal bahkan di daerah-daerah yang terlindungi, pembukaan perkebunan kelapa sawit, pembangunan jalan, dan pertambangan.¹⁷

Salah satu yang menjadi keprihatinan internasional adalah degradasi hutan di Pulau Sumatra. Pulau ini merupakan bagian dari pusat keanekaragaman hayati Sundaland “Sundaland Hotspot” di Asia Tenggara, menjadi salah satu dari 25 sumber kehidupan flora dan fauna yang paling kaya sekaligus yang paling terancam di Bumi.¹⁸ Di pulau ini terdapat lebih dari 10.000 spesies tumbuh-tumbuhan, dan merupakan satu-satunya tempat di dunia dimana gajah, badak, harimau, macan tutul, dan orangutan dapat ditemukan di tempat yang sama. Enam belas dari 210 spesies mamalia bersifat unik terdapat di pada pulau ini.

Upaya perlindungan atau penyelamatan keanekaragaman hayati di Sumatera, bukanlah hal yang baru. Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana dan tenaga yang tidak sedikit untuk pengelolaan kawasan konservasi, termasuk dana yang berasal dari bantuan internasional, baik melalui kerjasama bilateral maupun multi-lateral serta dari lembaga-lembaga organisasi non-pemerintah baik nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Pemerintah Indonesia telah menetapkan 134 unit kawasan konservasi di Pulau Sumatera, dengan total luas keseluruhan 5.742.196,17 ha dengan bagian terbesar berupa 11 unit Taman Nasional seluas 3.882.218,48 ha.¹⁹ Namun demikian, fakta lapangan menunjukkan bahwa antara tahun 1985 hingga 2007, kerusakan hutan di Sumatera sangat tinggi yang ditunjukkan dengan penurunan tutupan hutan

¹⁶ “Keanekaragaman Hayati Turun”, *Kompas*, 29 November 2013, h.5.

¹⁷ Renstra-TFCA-Sumatera-2010-2015, <http://tfcasumatera.org/wp-content/uploads/2014/01/Renstra-TFCA-Sumatera-2010-2015-Ina1.pdf>, diakses 4 Februari 2014.

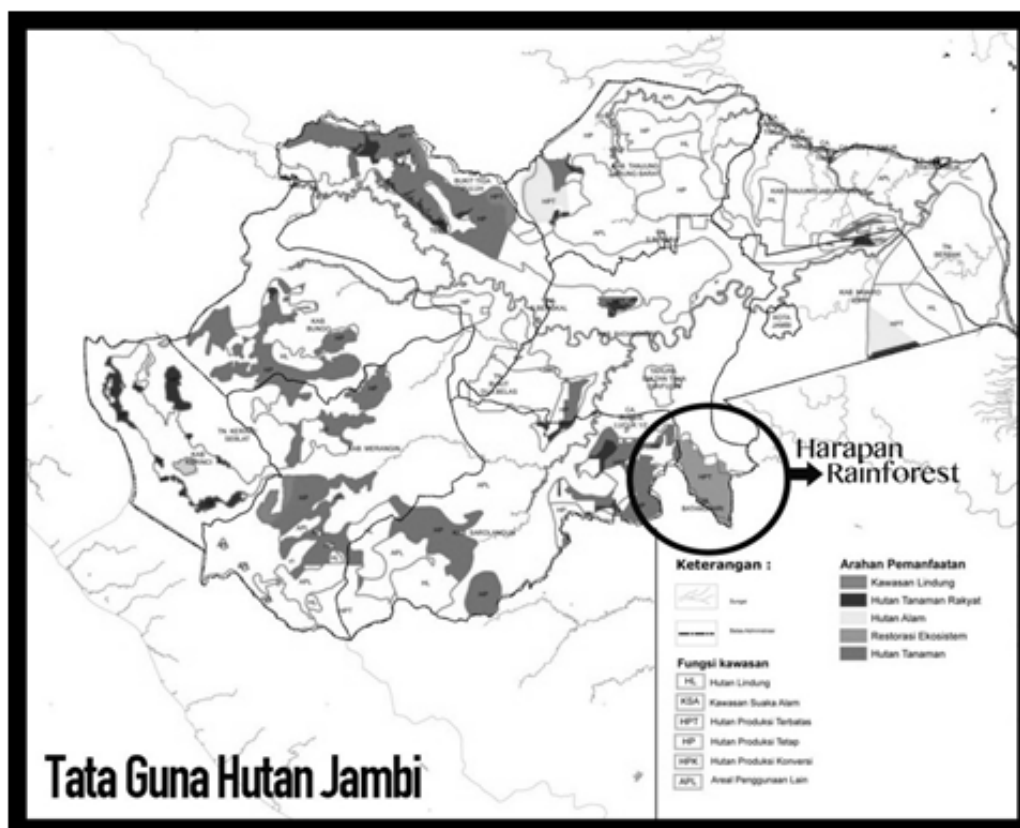
¹⁸ Assessing Five Years of CEPF Investment in the Sumatra Forest Ecosystem in Sumatra Forest Ecosystem of the Sundaland Biodiversity Hotspot, <http://www.cepf.net/documents/final.bahasa.sundaland.sumatra.ep.pdf>, diakses 4 Februari 2014.

¹⁹ Renstra-TFCA Sumatera 2010-2015, <http://tfcasumatera.org/wp-content/uploads/2014/01/Renstra-TFCA-Sumatera-2010-2015-Ina1.pdf>, diakses 4 Februari 2014.

seluas 12 juta ha atau penurunan luas hutan sebesar 48% dalam 22 tahun akibat alih fungsi hutan, pembalakan liar dan kebakaran.

Berdasarkan data Kementerian Kehutanan (2008), pada periode 2003-2006 kerusakan hutan dan deforestasi di dalam kawasan hutan Pulau Sumatera adalah yang terbesar dibandingkan dengan pulau-pulau besar lainnya, yaitu seluas 268.000 ha per tahun.

Kawasan ini diberi nama Hutan Harapan, karena ada harapan bagi upaya perbaikan hutan di seluruh Sumatera. Hutan yang sangat rusak ditanami ulang, hutan yang rusak diperbaiki, sementara bagian hutan yang dianggap masih baik akan dibiarkan tumbuh secara alami.²¹ Hutan Harapan merupakan mosaik antara area hutan dengan kondisi yang masih baik dan area yang telah terdegradasi sebagian



Tata Guna Hutan Jambi dan Hutan Harapan Jambi. Peta: Badan Lingkungan Hidup Jambi.

Pulau Sumatera menyumbang sebesar 22,8% terhadap deforestasi total di Indonesia (1,17 juta ha per tahun). Hutan primer Sumatera yang masih tersisa hanya sekitar 29%, padahal Sumatera membutuhkan tutupan hutan sekurang-kurangnya 40% untuk tetap dapat menyangga kehidupan dan melindungi pusat konsentrasi keanekaragaman hayati penting Pulau Sumatera. Sebagian besar hutan primer yang tersisa terletak di dalam kawasan konservasi dan/atau kawasan lindung yang berada di dataran tinggi dan relatif lebih rendah keanekaragaman hayatinya dibanding dataran rendah.²⁰

maupun keseluruhan. Sesuai perjanjian antara 10 Gubernur se-Sumatera, kawasan ini menjadi sasaran pertama perbaikan ekosistem hutan. Kawasan Hutan Harapan yang secara administratif terletak di wilayah dusun Kunangan Jaya, desa Bungku, Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, menempati kawasan eks Asia Log dan sebagian Inhutani. Kawasan ini merupakan lahan bekas perusahaan kayu Asia Log yang dikategorikan sebagai hutan terdegradasi. Hal ini sangat disayangkan karena kawasan ini menyimpan potensi keanekaragaman hayati, terutama berbagai

²⁰ *Ibid.*

²¹ Kato Kito, Berita Berkala harapan Rainforest, edisi 1-tahun I/2011, Jambi, REKI; 2011, h.4.

jenis satwa burung. Hutan Harapan merupakan rumah bagi tidak kurang 280 jenis burung, dimana 37 jenis berstatus terancam punah dan 82 jenis berstatus mendekati terancam punah.²² Salah satu kekayaan alam di sini adalah burung Rangkong yang merupakan burung endemis di Hutan Harapan. Dari 14 jenis burung rangkong di Indonesia, 9 di antaranya ada di sini. Burung Rangkong termasuk dalam daftar satwa yang dilindungi dan terancam punah.

Burung berperan besar dalam pelestarian hutan dengan cara menyebarkan benih pohon di kawasan hutan. Secara umum, Indonesia adalah salah satu negara *Mega Bird Diversity* di dunia dari 10.000 jenis burung di dunia, 1.594 jenis terdapat di Indonesia. Jumlah ini menempatkan Indonesia sebagai pemilik burung urutan ke-5 terbanyak di dunia.²³ Namun LSM Burung Indonesia mencatat, sekitar 122 jenis burung yang ada di Indonesia terancam punah dan masuk daftar merah IUCN (*International Union for Conservation of Nature*). Rinciannya adalah 18 jenis berstatus 'kritis', 31 jenis 'genting', sementara 73 jenis tergolong 'rentan'. Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai negara yang burungnya paling banyak terancam punah.²⁴ Selain perburuan dan perdagangan, penyebab utama terancam-punahnya berbagai jenis burung di Indonesia adalah gangguan atau perusakan habitat mereka.

Namun kedudukan yang paling terpenting dari Hutan Harapan adalah sebagai sebagai salah satu habitat untuk Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*). Harimau Sumatera, merupakan satu dari enam subspecies harimau yang masih bertahan hidup hingga saat ini dan termasuk dalam klasifikasi satwa kritis yang terancam punah (*critically endangered*) dalam daftar merah spesies terancam yang dirilis Lembaga Konservasi Dunia (*International Union and Conservation Nature/IUCN*). Harga jual harimau dan bagian tubuhnya sangat tinggi dengan kisaran mencapai Rp.30

²² Harapan Rainforest, Sumatera – Booklet REKI.

²³ Habitat Terusik Burung Terancam, <http://www.kicaumania.org/forums/archive/index.php/t-48571.html>. ES 15 FEB 2011.

²⁴ *Ibid.*

juta-Rp.40 juta. Maraknya perburuan liar terhadap harimau karena hukuman yang diberikan kepada pelaku teramat ringan hanya berkisar di bawah lima tahun.²⁵ Diperkirakan di Hutan Harapan terdapat sekitar 15 ekor Harimau Sumatera, dari sebuah populasi global yang diperkirakan tinggal beberapa ratus ekor diseluruh dunia. Hutan Harapan juga menjadi habitat buaya senyulong yang merupakan salah satu spesies dari 7 spesies buaya yang ada di Indonesia. Spesies ini tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Jawa. Spesies buaya Senyulong ini secara internasional sudah termasuk kategori genting (*Endangered*) yang terdaftar dalam daftar merah IUCN.

Di bidang flora, Hutan Harapan juga menjadi tempat hidup bagi kayu komersil yang bernilai mahal, seperti bulian, aneka jenis meranti dan jelutung. Terdapat 159 jenis pohon termasuk yang paling dominan jenis bulian. Pohon bulian termasuk spesies langka yang terkenal kuat dan hanya tumbuh di kawasan Hutan Harapan. Selain itu juga menjadi habitat tanaman obat-obatan yang sebagian besar belum pernah diteliti secara ilmiah manfaatnya bagi kepentingan manusia.

B. Konservasi Sebagai Kepentingan Global

Perhatian internasional terhadap degradasi hutan dan kepunahan keanekaragaman hayati, menguat dengan laporan Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan PBB berjudul Hari Depan Kita Bersama (*Our Common Future*) 1987. Laporan ini menekankan bahwa masalah lingkungan merupakan permasalahan global yang menjadi keprihatinan bersama.²⁶

Dengan dukungan internasional, dalam beberapa dekade terakhir, penetapan kawasan perlindungan telah menjadi suatu bisnis global. Cakupan konservasi diperluas untuk merangkum seluruh bidang keanekaragaman hayati agar dapat

²⁵ UU No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistem tidak menyebutkan hukuman minimal bagi para pemburu dan penjual hewan liar yang dilindungi. "Populasi Satwa Liar di Sumatera terus Menyusut", *Media Indonesia*, 15 Maret 2014, h.15.

²⁶ *Our Common Future*, http://conspect.nl/pdf/Our_Common_Future-Brundtland_Report_1987.pdf, diakses 4 Februari 2014.

mengakomodasi lebih banyak spesies. Hasilnya adalah praktek konservasi yang cenderung diterapkan pada poros Utara-Selatan, dengan lembaga konservasi berasal dari negara industri yang didanai oleh anggota mereka atau oleh lembaga donor dari negara Utara yang ingin melindungi sumber daya di belahan dunia Selatan dari ancaman manusia. Perhatian global terarah kepada daerah tropis karena lebih dari setengah spesies dunia ditemukan di kawasan tersebut. Keanekaragaman hayati tidak terdistribusi secara merata di bumi, wilayah tropis memiliki keanekaragaman hayati yang lebih kaya, karena jumlah keanekaragaman hayati semakin jauh dari ekuator akan semakin menurun. Semakin kaya keragaman kehidupan hayati, semakin besar kesempatan untuk penemuan medis, pembangunan ekonomi, dan tanggapan adaptif terhadap tantangan baru seperti perubahan iklim. Di hutan hujan tropis misalnya, dengan banyak jenisnya menghasilkan sejumlah besar hasil tumbuhan dan hewan yang bisa digunakan sebagai sumber makanan, tempat bernaung dan obat-obatan yang berguna bagi manusia. Sebagai contoh tumbuh-tumbuhan tropis, dikenal merupakan sumber dari alkaloida yang dipakai dalam pengobatan modern.²⁷ Demikian pentingnya keanekaragaman hayati bagi manusia sehingga menjadi suatu sumber daya bersama yang harus dilestarikan.

Menurut perkiraan Program Lingkungan PBB (*United Nation Environment Program/UNEP*) 1992 ada sekitar 30 juta spesies di Bumi. Baru sekitar satu setengah juta yang sudah terspesifikasikan sedangkan sekitar seperempat darinya terancam punah.²⁸ Mayoritas spesies tersebut bertempat di hutan-hutan tropis, tetapi banyak sekali habitat hutan ini yang sedang menuju kepunahan. Kerusakan lingkungan hidup dan punahnya keanekaragaman hayati di muka bumi seringkali terjadi karena adanya interaksi antara aktifitas ekonomi dan eksistensi sumberdaya alam. Semakin besar intensitas eksploitasi sumber daya alam akan semakin besar pula dampaknya terhadap degradasi

²⁷ Alikodra, *Ibid.*, h. 220-221.

²⁸ UNEP, "the State of the Global Environment", *Our Planet*, 4.2, 1992.

kualitas lingkungan hidup dan kepunahan keanekaragaman hayati. Laju kepunahan semakin dipercepat dengan kerusakan habitat yang semakin luas akibat perubahan iklim, serta ekspansi ekonomi dan teknologi.

Punahnya keanekaragaman hayati merupakan masalah global dan kerugian besar bagi umat manusia. Penghancuran hutan hujan tropis seringkali dianalogikan sebagai penghancuran "perpustakaan dunia" yang menyimpan buku-buku yang belum terbaca.²⁹ Kerugian dari kehilangan keragaman hayati adalah hilangnya kesempatan mempelajari spesies tersebut yang mungkin dapat sangat berguna bagi kehidupan manusia, seperti untuk kepentingan pangan, pengobatan maupun kebutuhan industri lainnya. Habitat-habitat seperti hutan tropis dan bukit karang akan merupakan prioritas utama untuk pelestarian.

Oleh sebab itu banyak pihak yang tergerak untuk melakukan pelestarian lingkungan dan penyelamatan keanekaragaman di kawasan tropis. Identifikasi prioritas bidang-bidang konservasi keanekaragaman hayati dikawasan tropis menjadi bisnis yang sangat teknis. Sistem operasional konservasi umumnya menggunakan pendekatan model *top down* dimana pemilihan lokasi dipilih oleh pihak penyandang dana. Melalui kebijakan '*triage global*' upaya penyelamatan bidang dengan keanekaragaman hayati dimulai dari daerah yang paling tidak rentan atau masih bisa diselamatkan, dengan mengabaikan bidang-bidang yang sudah tidak terselamatkan. Akibat pendekatan ini adalah kawasan perlindungan cenderung dipilih berdasarkan kriteria teknis, sedangkan masalah sosial dan politik hanya menjadi pertimbangan kedua.³⁰

C. Aktor-Aktor Internasional dalam Restorasi Ekosistem Hutan Harapan

Perhatian internasional terhadap upaya restorasi ekosistem di kawasan yang kemudian diberi nama Hutan Harapan merupakan inisiatif *The Royal Society for the Protection of Birds* (RSPB)

²⁹ Robin Attfield, *ibid.*, 189.

³⁰ Marcus Colchester, *Menyelamatkan Alam-Penduduk asli Kawasan Perlindungan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati*, Jakarta, WGCOP-Walhi, 2009, h. 23-25.

dan *BirdLife International* bersama dengan LSM Burung Indonesia. Sebagai LSM yang bergerak dalam bidang pelestarian burung, pelestarian Hutan Harapan dilakukan dengan tujuan agar kawasan ini menjadi salah satu daerah persinggahan yang aman bagi burung-burung migran di Indonesia. Keanekaragaman hayati yang ada di hutan ini menjadikan tempat yang tepat untuk penelitian pengelolaan hutan berkelanjutan dan penghidupan masyarakat pedesaan sekitar hutan yang berkelanjutan, yang kemudian hasilnya dapat diterapkan di sebagian besar wilayah dunia.³¹ Banyak pihak yang kemudian bersedia menjadi sponsor atau memberikan bantuan dana bagi pengelolaan Hutan Harapan. Dalam perkembangannya tujuan konservasi tidak hanya terbatas hanya pada masalah burung saja, melainkan juga mencakup flora fauna lainnya. Kekayaan keanekaragaman hayati Hutan Harapan pada akhirnya juga menjadi daya tarik bagi lokasi penelitian internasional di bidang keanekaragaman hayati.

Birdlife International memiliki wilayah operasi dan mitra dilebih seratus negara. Secara khusus LSM ini bergerak di bidang konservasi pelestarian burung, terutama spesies-spesies langka yang terancam kepunahan dan habitatnya di seluruh dunia.³² *The Royal Society for the Protection of Birds* (RSPB) adalah Mitra *BirdLife* yang mempunyai visi internasional untuk mempertahankan angka, keragaman dan distribusi geografis, habitat dari burung di dunia. RSPB yang berdiri sejak 1889 di Inggris, bergerak dalam upaya perlindungan satwa liar, habitatnya dan pengelolaan cagar alam keanekaragaman hayati.³³ Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pelestarian burung, umumnya merupakan LSM yang bermarkas di Inggris dengan jaringan kemitraan global.

Dalam upaya restorasi ekosistem di Hutan Harapan RSPB dan *Birdlife* bekerja sama dengan mitranya di Indonesia yakni LSM Burung

Indonesia (Perhimpunan Pelestari Burung dan Habitatnya). LSM Burung Indonesia bergerak dalam pelestarian burung liar Indonesia dan habitatnya, dengan cara mempromosikan konservasi situs, spesies dan habitat burung dengan berbagai pihak. Kinerja LSM ini berfokus pada tindakan menjaga lokasi-lokasi prioritas (Penting Burung Area) berdasarkan data yang komprehensif dan handal.³⁴ Di tahun 2002 ketiga LSM inisiator tersebut bergabung menjadi konsorsium *Birdlife* dalam bentuk Yayasan Konservasi Ekosistem Indonesia (KEHI) dengan PT REKI sebagai pengelola Hutan Harapan.

Hutan Harapan membutuhkan pengelolaan dengan komitmen jangka panjang. Keseluruhan proses perbaikan ekosistem diperkirakan membutuhkan dana sekitar 20 miliar rupiah per tahun. Tidak mudah untuk meyakinkan para pihak untuk mendukung restorasi ekosistem Hutan Harapan yang belum memiliki payung hukum. Dukungan yang paling besar datang dari Pangeran Charles putra mahkota kerajaan Inggris. Pangeran Charles putra mahkota kerajaan Inggris, yang dikenal peduli terhadap masalah lingkungan hidup terutama terkait deforestasi hutan hujan tropis dan perubahan iklim. Ia adalah pelindung LSM *The Royal Society for the Protection of Birds* (RSPB) dan *BirdLife International*. Pangeran Charles sangat mendukung upaya tersebut dan mengundang sejumlah tokoh masyarakat Eropa, LSM, pihak Departemen Kehutanan RI dan Duta Besar Indonesia saat itu Yuwono Sudarsono ke kediamannya.³⁵ Dengan dukungan penuh Pangeran Charles melalui berbagai acara lobi, dana awal untuk Hutan Harapan berhasil didapat dari berbagai sumber mitra RSPB dan *Birdlife* di berbagai negara, khususnya di Eropa. Sementara Yayasan KEHI mempersiapkan sumber dana dalam bentuk *trustfund* sehingga

³¹ CIFOR dan Indonesia Kemitraan untuk Hutan dan Masyarakat, CIFOR, Maret 2012, h.5.

³² *Birdlife International*, http://www.birdlife.org/worldwide/index.html?gclid=CLqgx_aILLMCFQob6wod_1oADQ diakses 22 oktober 2012.

³³ *Ibid.*

³⁴ Wawancara dengan Agus Budi Utomo, managing direktur Burung Indonesia, pada tanggal 27 Juli 2010.

³⁵ Masyarakat Rambah 7.000 ha Kawasan Hutan Harapan Rainforest Jambi 3-Nov-2008, <http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=4&jd=Masyarakat+Rambah+7.000+ha+Kawasan+Hutan+Harapan+Rainforest+Jambi&dn=20081103112051#>.

kegiatan di lapangan dapat terlaksana dalam waktu cukup panjang. Selanjutnya pendanaan tersebut dicarikan melalui mekanisme *carbon offsetting* dari negara-negara maju penandatanganan Protokol Kyoto beberapa diantaranya Inggris, Denmark, Jerman, Uni Eropa dan Jepang.³⁶ Dana juga didapat dari Konservasi *Global Conservation International*, Uni Eropa, mitra *BirdLife* organisasi di Jerman, Swiss, Belgia, Denmark, Singapura dan Belanda, yayasan dan lembaga lainnya serta ribuan donor individu.³⁷ Mereka bersepakat membantu Hutan Harapan sebagai bagian dari kewajiban mereka untuk menurunkan kadar emisi di negaranya sebanyak 5 persen dari periode tahun 1990-2012.

Diplomasi lingkungan yang dilakukan baik oleh Pangeran Charles maupun LSM RSPB dan *BirdLife International* selaku aktor bukan negara dalam hubungan internasional tidak terlepas dari kepentingan Inggris. Setiap aktor yang berperan dalam hubungan internasional pasti memiliki sebuah kepentingan. Peran aktor-aktor tersebut saling berkaitan sehingga membentuk sebuah sistem hubungan internasional yang kompleks. LSM RSPB dan *BirdLife International* tidak berkepentingan atas nama negara, tetapi kedua LSM tersebut dianggap sebagai organisasi yang bisa membantu negara dalam mencapai kesepakatan mengenai masalah kebijakan internasional.³⁸ Pangeran Charles secara individu juga berperan sebagai aktor hubungan internasional dengan turut berperan dalam kelangsungan interaksi internasional mengenai restorasi ekosistem di Hutan Harapan. Inggris berkepentingan dalam masalah ini, hasil evaluasi tim peneliti Inggris menyatakan deforestasi di hutan hujan seluruh

penjuru dunia telah mendorong terjadinya perubahan iklim global yang berakibat buruk terhadap perekonomian dunia. Nilai kerusakan dari perubahan iklim akan bertambah hingga 1 triliun dolar AS jika tidak ada upaya mencegah deforestasi. Restorasi ekosistem adalah salah satu cara yang cukup efektif untuk melawan deforestasi. Dieter Hoffmann, kepala program internasional di *Birdlife International* (2010) menyatakan adanya keuntungan REDD melalui restorasi ekosistem di Hutan Harapan adalah setara dengan emisi carbon pertahun wilayah Manchester.³⁹

Reducing Emission from Deforestation and Degradation of Forest atau REDD dihasilkan oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC) di Cancun tahun 2010. Proyek ini banyak ditentang oleh petani dan masyarakat adat di negara-negara berkembang, seperti di Amerika Latin, Afrika, dan Asia karena dianggap proyek kapitalisme global untuk memprivatisasi fungsi hutan, yakni menangkap dan menyimpan karbon, untuk dikomersilkan dalam kerangka perdagangan karbon. Pangeran Charles selaku anggota kelompok bisnis di forum perubahan Iklim Uni Eropa (EUCLG) merupakan pendukung perdagangan karbon. Kelompok bisnis tersebut beranggotakan perusahaan-perusahaan besar Eropa diantaranya Acciona, Alstom, Coca Cola, Deutsche Telekom, Doosan Power Systems, Intel, Kingfisher, Philips, Shell and Unilever. European Climate Exchange, misalnya, menempatkan nilai karbon pada kisaran 10 sampai 100 dolar AS per ton.⁴⁰

Kesepakatan lingkungan hidup di tingkat internasional berkembang pesat sejalan dengan peningkatan kasus lingkungan di berbagai belahan bumi. Kesepakatan internasional di bidang lingkungan hidup berpengaruh pada pembuatan kebijakan dan penataan

³⁶ *Carbon offsetting* adalah instrumen keuangan yang dikembangkan di bawah Protokol Kyoto (yang diadopsi pada tahun 1997 dan mulai berlaku pada tahun 2005) yang memungkinkan perusahaan dan pemerintah dari negara-negara industri untuk memenuhi target wajib mereka pengurangan emisi karbon dengan caramembayar kredit pembelian karbon di negara berkembang.

³⁷ Info Harapan Rainforest, www.nabu.de/downloads/Info_harapan_rainforest.pdf.

³⁸ P. Anthonius Sitepu, *Studi Ilmu Politik*, Yogyakarta; Graha Ilmu, 2012, h.133, baca pula Dean A.Minix dan Sandra M. Hawley, West; Wadsworth, 1998, h.143.

³⁹ Pangeran Charles Dukung Restorasi Ekosistem di Indonesia, <http://www.antaranews.com/print/122413/>, diakses 11 Februari 2014.

⁴⁰ The Prince of Wales's Corporate Leaders Group, www.cisl.cam.ac.uk/Business-Platforms/The-Prince-of-Wales-Corporate-Leaders-Group/EU-CLG.aspx, diakses 20 Juni 2014.

kelembagaan di Indonesia. Kebijakan luar negeri Indonesia di bidang lingkungan pengelolaan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari diplomasi politik dan ekonomi global.⁴¹ Dalam struktur kelembagaan Kementerian Luar Negeri di tahun 2001, telah dibentuk bagian khusus yang bergerak dalam diplomasi lingkungan hidup yaitu Direktorat Lingkungan Hidup dan Pembangunan di bawah Dirjen Multilateral.

Banyak kesepakatan internasional mensyaratkan komitmen untuk pengendalian tingkat konsumsi dan eksploitasi sumberdaya alam, dimana “pengendalian” lebih banyak diartikan sebagai “penurunan” yang justru sangat dihindari dalam pendekatan perekonomian negara yang harus selalu tumbuh. Akibatnya, diplomasi internasional diwarnai tarik-menarik mengenai tingkat kompensasi antara satu negara dengan negara lain. Kebijakan luar negeri Indonesia di bidang lingkungan hidup juga tidak luput dari jebakan polarisme posisi antar negara tersebut. Indonesia harus menunjukkan komitmen untuk melaksanakan perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup dengan meratifikasi atau menindaklanjuti beberapa kesepakatan-kesepakatan internasional di bidang lingkungan.

Pemerintahan Indonesia di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempunyai komitmen untuk melindungi dan menjaga kelestarian hutan. Diantaranya Indonesia merupakan pemrakarsa “Forest-11”, “Coral Triangle Initiative” dan “World Ocean Conference”, serta promotor *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries* (REDD). Berbagai upaya diplomasi telah dilakukan untuk mendukung citra positif Indonesia dalam masalah lingkungan hidup di tingkat internasional. Diplomasi lingkungan hidup Indonesia diarahkan untuk menjaga dan mementingkan kepentingan nasional serta membangun peningkatan citra internasional. Sasaran yang hendak dicapai dalam pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerja sama

internasional dalam bidang multilateral adalah meningkatnya peran aktif Indonesia dalam isu lingkungan hidup melalui penguatan kerjasama multilateral.

Kepentingan nasional yang besar akan pelestarian hutan, khususnya di kawasan Hutan Harapan telah mendorong pemerintah Indonesia mengeluarkan sejumlah kebijakan. Di bulan Juni 2004, misalnya, Menteri Kehutanan menetapkan Restorasi Ekosistem pada Hutan Produksi (IUPHHK RE Permenhut No. SK 159/Menhut-II/2004), dan menetapkan 101,355 ha di hutan Sumatera sebagai lokasi pertama Restorasi Ekosistem pada Hutan Produksi pada bulan April 2005. Menteri Kehutanan kemudian mengeluarkan izin pertama Restorasi Ekosistem seluas 52,170 ha di provinsi Sumatra Selatan (SK Menhut No.293/Menhut-II/2007) mencakup areal hutan produksi di kelompok hutan Sungai Meranti-Sungai Kapas, Kabupaten Musi Banyuasin.

Meski telah memiliki SK Menteri Kehutanan, namun yayasan KEHI belum juga dapat segera mengelola wilayah Hutan Harapan di Provinsi Jambi. Yayasan KEHI memerlukan dukungan politik untuk dapat melakukan program kerjanya. Oleh sebab itu, pada bulan November 2008, Pangeran Charles secara khusus melakukan kunjungan ke Hutan Harapan di wilayah Jambi tersebut. Dalam kunjungan tersebut Pangeran Charles memotivasi semua rakyat Indonesia agar melestarikan hutan yang kondisinya kian parah akibat perambahan dan pembalakan liar. Ia juga meminta agar pelaksanaan restorasi ekosistem Hutan Harapan itu setidaknya mendapat dukungan sepenuhnya dari Pemerintah Indonesia, karena pelaksanaan restorasi hutan itu bertujuan untuk memperbaiki hutan yang sudah rusak dan selanjutnya kembali dapat berfungsi sebagai hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia. Kunjungan Pangeran Charles di tahun 2008 diyakini merupakan bentuk tekanan *softpower* agar pemerintah Indonesia segera memberikan pengelolaan Hutan Harapan kepada PT. REKI di wilayah Jambi. Walau diagendakan Pangeran Charles tidak melakukan kunjungan ke kawasan

⁴¹ Heidi Wittmer *Between Conservationism, eco-populism and developmentalism – Discourse in Biodiversity Policy in Thailand and Indonesia*, CAPRI Working Paper No.37, Washington DC: International Food Policy Research Institute., h. 87.

Hutan Harapan yang berada di Kabupaten Musi Bayuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin dan Menteri Kehutanan saat itu, MS Kaban, memberikan dukungan penuh untuk konservasi Hutan Harapan.

Secara bilateral Indonesia dan Inggris memiliki MoU untuk kerjasama kemitraan di bidang perubahan iklim.⁴² Perubahan iklim merupakan tantangan terbesar dunia dan kedua negara sepakat membentuk suatu kelompok kerja untuk memperbaiki konservasi hutan, pengembangan pasokan energi terbarukan, meningkatkan cara-cara untuk penghematan energi, serta menyiapkan masyarakat setempat untuk menyesuaikan diri dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Kerjasama ini menjadi ikatan untuk menjajagi semua kemungkinan dan pendekatan dalam mengatasi perubahan iklim. Pihak Inggris sendiri meyakini akan perlunya kerjasama antara pemerintah, jaringan bisnis dan masyarakat. Dalam MoU tersebut kedua pihak sepakat untuk menyiapkan kerangka konsultasi dan kerjasama dalam mengidentifikasi kesempatan dalam aktifitas penggunaan tanah kehutanan dan melaksanakan kegiatan berdasarkan REDD (*Reduced Emissions from Deforestation and Degradation*), memajukan manajemen berkelanjutan dalam produksi minyak sawit, termasuk aktif berpartisipasi dalam pertemuan Internasional. Selain itu, kedua belah pihak sepakat memberikan bantuan teknis tentang risiko iklim dan strategi adaptasi dalam rangka mengembangkan kemampuan adaptasi masyarakat lokal; menjajagi kesempatan untuk kerjasama pengembangan, penempatan, penyebaran dan transfer teknologi `low carbon` khususnya untuk energi terbarukan dan teknologi efisiensi energi. Penandatanganan MoU tersebut merupakan tindak-lanjut dari komitmen yang dihasilkan pada pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan PM Tony Blair pada bulan Maret 2006, dan

⁴² Indonesia-Inggris Kerjasama Perubahan Iklim http://www.infogate.com/viewstory/2008/12/22/indonesia_inggris_kerjasama_perubahan_iklim?url=http://antara.co.id/arc/2008/12/15/indonesia-inggris-kerjasama-perubahan-iklim.

pertemuan awal Forum Kemitraan RI - Inggris pada Januari 2007.

Diplomasi Pangeran Charles membuahkan hasil, di tahun 2010 Menteri Kehutanan mengeluarkan ijin Restorasi Ekosistem seluas 46,385 ha di Provinsi Jambi (SK Menhutno.327/Menhut-II/2010). Dalam hal kegiatan restorasi dalam hutan alam belum memperoleh keseimbangan, PT. REKI diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK), Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) pada hutan produksi. Apabila telah diperoleh keseimbangan, kepada PT. REKI dapat diberikan IUPHHK pada hutan produksi. REKI mendapat izin kelola selama 60 tahun, yang bisa diperpanjang tiap 35 tahun. Selama itu pula, jeda balak diberlakukan. Artinya, pemanfaatan kawasan hanya bisa dilakukan dengan mengambil hasil hutan non kayu, jasa perdagangan karbon serta ekowisata. Peran Pangeran Charles yang dominan dalam masalah ini menyebabkan masyarakat Jambi lebih mengenal Hutan Harapan sebagai 'Hutan Pangeran Charles'.

Selain untuk pemulihan habitat hutan dan ekosistem, mandat yang diterima pengelola Hutan Harapan adalah juga mencakup fungsi pengembangan sosial ekonomi masyarakat. Dalam pelaksanaannya pengelola Hutan Harapan tidak mengesampingkan keberadaan suku Bathin Sembilan yang merupakan suku asli rimba penghuni kawasan hutan tersebut. Bentuk pengakuannya adalah melakukan beberapa program sosial ekonomi dibidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan ekonomi suku Bathin Sembilan. Fungsi dilaksanakan dengan menyelenggarakan fasilitas pendidikan dasar kepada anak-anak suku Bathin Sembilan yang tinggal di sekitar kawasan hutan.⁴³

PT REKI diijinkan melakukan pemanfaatan jasa hutan non kayu, diantaranya dengan pengembangan bibit tanaman hutan, pengambilan getah karet, jernam maupun jelutung yang bernilai ekonomi tinggi dan pengembangan

⁴³ Sejarah Harapan Rainforest, *Kato Kito*, Berita Berkala Harapan Rainforest, edisi 1-tahun I/2011, Jambi, REKI; 2011, h.2-6.

madu hutan. Upaya kearah ekowisata belum berjalan karena masih adanya hambatan infrastruktur dan keterbatasan sarana. Sedangkan perdagangan karbon dalam skema REDD sejauh ini belum terjadi karena bukan menjadi tujuan utama restorasi ekosistem di Hutan Harapan. Keberhasilan Hutan Harapan juga mengundang minat investor untuk mengikuti jejak PT REKI mengelola kawasan hutan produksi melalui restorasi ekosistem. Tercatat 17 pemohon IUPHHK-RE sudah melayangkan suratnya ke Kementerian Kehutanan, mereka membidik sebanyak 23 titik lokasi yang tersebar di pulau Sumatera, Kalimantan dan pulau Sulawesi.

D. Dilema Hutan Harapan

Politik konservasi Barat cenderung menolak keberadaan masyarakat dalam kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Oleh karena itu pelaksana dan penggiat konservasi tersebut senantiasa mencari pengesahan dan wewenang dengan cara bekerja sama dengan pemerintah. Hal ini diperlukan karena mereka mengalami hambatan mencari dukungan masyarakat sekitar area konservasionis. Penggiat konservasi klasik mendekati kepada pemerintah dengan harapan terjaminnya keberlangsungan program mereka, dengan status lahan yang sah dan mewajibkan pemain lokal untuk mengubah kegiatan sosial ekonomi mereka sesuai dengan kepentingan konservasi. Namun hal tersebut sulit untuk dilaksanakan dalam kasus Hutan Harapan.

Keberhasilan para aktor internasional membangun konservasi ekosistem di Hutan Harapan tidak diiringi dengan kesiapan masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam program tersebut. Masyarakat sekitar kawasan sifatnya multi-etnis. Mereka berasal dari Pulau Jawa, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Kabupaten Kerinci (Jambi), serta masyarakat asli suku Bathin. Masyarakat sekitar hutan menjadi persoalan jika mereka tidak diberdayakan untuk ikut berpartisipasi mengelola kawasan restorasi. Restorasi Hutan Harapan realitasnya masih terkendala pembalakan liar dan penjualan

lahan oleh masyarakat setempat. Berdasarkan data Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Jambi, sekitar 7.000 hektar dalam areal Hutan Harapan sudah diperjualbelikan. Akibat pembalakan liar ini, hanya 30% areal Hutan Harapan yang masih dalam kondisi bagus. Lalu 30% berkondisi sedang dan 30% dalam keadaan rusak. Sebanyak 10% lagi menjadi semak.⁴⁴ Terkait dengan pembalakan, perusakan, dan perambahan hutan yang dilakukan masyarakat lokal, diakui, bukan hal mudah mengatasinya. Pengelola Hutan Harapan belum punya sistem terpadu cara penanganan masalah itu secara tuntas. Mereka hanya mengandalkan patroli petugas keamanan perusahaan bersama anggota kepolisian. PT REKI merekrut 100 warga lokal sebagai karyawan hingga pelatihan pemakaian komputer, GPS, dan alat pemadam kebakaran. REKI pun membangun sarana komunikasi, bekerja sama dengan operator seluler Indosat dan membantu warga menjual hasil hutan non-kayu seperti rotan.

Jauh sebelum kedatangan PT. REKI, masyarakat setempat sudah memanfaatkan sebagian kawasan hutan yang cukup lama terlantar dan tidak terkelola setelah ditinggalkan pihak pemegang HPH. Sejak tahun 2001, masyarakat telah menanami sebagian kawasan itu dengan tanaman perkebunan seperti sawit, karet, palawija, dan lain-lain. Pengambilalihan lahan itu bertepatan dengan program pembaruan agraria pemerintahan, khususnya pemanfaatan lahan terlantar dimasa Presiden Abdurrahman Wahid. Di kawasan tersebut sudah terbentuk dusun secara resmi. Salah satunya adalah Dusun Kunangan Jaya II yang dihuni oleh 900 keluarga atau sekitar 3.000 jiwa, dan terbagi atas delapan rukun tetangga. Dusun Kunangan Jaya II juga memiliki jalan poros dan jalan lingkungan dari tanah liat, punya 4 mesjid, 3 mushollah, 2 gereja, dan sebuah sekolah dasar (SD) serta sebuah Madrasah Diniyah. Lebih jauh lagi, Dusun Kunangan Jaya sudah punya struktur atau aparatur pemerintahan resmi, seperti Kepala Dusun, yang digaji oleh negara.

⁴⁴ Hutan Harapan Jambi di Majalah GATRA edisi 29 (28 Mei-3 Juni 2009).

Pemerintah daerah setuju dengan dilakukan restorasi ekosistem untuk mengembalikan keasrian hutan. Namun tetap saja dalam kerjasama kemitraan seperti ini tentu terdapat kendala-kendala yang harus dihadapi. Bantuan luar negeri untuk membantu melestarikan lingkungan hutan sangat dihargai oleh pemerintah daerah Provinsi Jambi, karena pada dasarnya setiap pemerintah daerah diberikan tanggung jawab secara penuh untuk melakukan perlindungan khusus terhadap keanekaragaman hayati yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian atau Menteri Kehutanan yang ada di wilayahnya.⁴⁵ Namun karena program bantuan restorasi ekosistem merupakan hal yang baru, pemerintah daerah dan instansi terkait belum memiliki format seperti apa program ini akan dilaksanakan. Bagi masyarakat daerah sendiri usaha melindungi keanekaragaman hayati yang terancam kepunahan kurang menarik perhatian, karena pengertiannya masih terbatas pada lingkup perlindungan untuk kelangsungan hidupnya dan seringkali dianggap tidak sejalan dengan kepentingan ekonomi masyarakat.

Pendekatan konservasi klasik yang cenderung melakukan pemisahan antara masyarakat setempat dengan pemerintah, tidak meredakan konflik. Kerap terjadi perbedaan kepentingan antara kepentingan global dan nasional dan masyarakat sekitar. Konflik berkaitan dengan hak atas tanah kerap terjadi, khususnya di negara-negara berkembang yang memiliki tradisi bertolak belakang dengan praktik konservasi di Inggris. Hal ini terlihat dalam benturan kepentingan antara PT REKI dengan masyarakat setempat yang seringkali disertai tindak kekerasan terhadap kedua belah pihak. Paska dikeluarkannya Instruksi Gubernur Jambi No: 04/INST.GUB/Dishut.5.3/2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perambahan, Pembakaran, dan Penebangan Hutan Secara Ilegal di Kawasan Hutan Produksi PT REKI. Konflik dengan masyarakat sekitar hutan semakin kuat. Ribuan petani yang berada di kawasan Hutan Harapan diharuskan meninggalkan lahannya

⁴⁵ Alkodra, h. 227.

karena kegiatan masyarakat di kawasan hutan produksi PT REKI dianggap perambah atau perusak hutan secara ilegal.

Prinsip baru konservasi yang mengikutsertakan penduduk setempat belum diterapkan secara meluas di negara-negara berkembang. Upaya konservasi ekosistem di Hutan Harapan merupakan inisiatif yang diarahkan dari pihak luar. Proyek konservasi ini bekerja berdasarkan pemikiran bahwa konservasi adalah sesuatu yang dilakukan oleh pihak luar untuk lingkungan lokal. Peran sebagai manajer sumberdaya alam antara lain pencari dana dan pengatur dalam pembuatan keputusan pengelolaan, namun sekaligus menjembatani kepentingan ekonomi penduduk setempat menjadi sangat sulit dilaksanakan. Upaya konservasi yang mengabaikan hak dan kepentingan masyarakat setempat seringkali dialamatkan untuk mendukung kepentingan negara, dan masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Padahal dalam semua proyek yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam dukungan dari masyarakat setempat mutlak diperlukan karena tujuan dari proyek tersebut adalah adanya alternatif ekonomi bagi penduduk sekitar agar tidak merambah hutan.⁴⁶ Tanpa dukungan masyarakat setempat, upaya negara untuk mengendalikan penduduk setempat tidak hanya menimbulkan ketegangan dengan masyarakat setempat, tetapi juga menghilangkan sumber mata pencaharian mereka sebagai petani yang telah terlebih dahulu ada sebelum proyek Hutan Harapan berdiri.

Konservasi menjadi dilema, di satu pihak konservasi bertujuan melestarikan alam demi kepentingan manusia generasi mendatang. Tetapi di lain pihak harus mampu membiayai diri dengan bentuk-bentuk yang tidak merusak. Hal ini seringkali menimbulkan masalah antara pengelolaan konservasi dengan penduduk sekitar karena faktanya kebanyakan kawasan konservasi sudah ada penduduk di

⁴⁶ Philip M. Hunsicker dan Fidele Ngambesso, "Banking on A Nature Reserve". dalam *Indigenous Peoples and Protected Areas-The Law of Mother Earth*, Elizabeth Kemp (ed.), London, Earthscan, 1993, h.231.

dalamnya. Meskipun memiliki tujuan baik, dalam upaya restorasi ekosistem ini juga telah terjadi diskursus konservasi yang berdampak pada kehidupan masyarakat lokal di sekitar Hutan Harapan. Selama ini telah terjadi perubahan fungsi di kawasan yang menjadi lahan Hutan Harapan oleh masyarakat setempat. Lahan di kawasan tersebut telah lama diperjual belikan dan didiami penduduk pendatang yang membuka lahan tersebut menjadi areal perkebunan kelapa sawit, karet dan perladangan. Di tahun 2010 kerusakan semakin parah karena banyak yang membuka kebun dengan cara membakar hutan.⁴⁷ Negara masih lemah dalam upaya mengatasi maraknya pendudukan hutan di Jambi. Dana yang tersedia di APBD Jambi untuk kegiatan patroli hutan dan proses penyelidikan hanya Rp350 juta. Selain daripada itu lemahnya koordinasi antarsektor juga menjadi lambannya kemajuan mitigasi program REDD+ di Jambi. Lahan yang terlantar tanpa pengawasan tersebut dengan mudah dikuasai masyarakat.⁴⁸

Kawasan konservasi di Indonesia banyak mengalami masalah dan pemerintah kerap tidak mampu mencari pemecahannya. Salah satu faktornya adalah karena masing-masing lembaga pemerintah mempunyai aliran pemikiran yang berbeda-beda. Lembaga yang bertanggungjawab mengelola kawasan konservasi cenderung menerapkan aliran konservasionis, sedangkan lembaga sektoral yang bertugas menghasilkan komoditi sumberdaya alam untuk pembangunan ekonomi cenderung menerapkan aliran developmentalis.⁴⁹ Konflik pengelolaan sumber daya alam di Indonesia banyak berawal dari tidak jelasnya penguasaan lahan. Ketidakjelasan basis hak yang tepat bagi rakyat untuk memanfaatkan sumber daya alam, hingga kebijakan penataan penguasaan sumber daya alam yang kurang tegas, sehingga tidak memberikan keadilan bagi semua pihak. Karenanya pembenahan penguasaan sumber

daya alam menjadi agenda penting. Selain itu, kejelasan hak bagi rakyat dalam menguasai sumber daya alam juga menjadi insentif bagi upaya pelestarian sumber daya alam.⁵⁰

Harus dipahami partisipasi masyarakat secara luas menjadi penting yang menentukan keberhasilan upaya pelestarian lingkungan. Tidak adanya perhatian terhadap masalah sosial politik yang muncul dari keberadaan masyarakat setempat, menyebabkan mereka selalu melakukan upaya penolakan pada proyek konservasi Hutan Harapan. Pendekatan kepada masyarakat setempat harus dimulai dari penilaian berdasarkan konflik dan kemudian diikuti dengan membuat prosedur, komunikasi antara penduduk setempat dengan pengelola dan memastikan bahwa penduduk setempat menerima keuntungan atau kompensasi. Namun hal ini sulit dilaksanakan karena perbedaan budaya, beragam prioritas dan masalah ekonomi.

Dalam menyampaikan protesnya masyarakat petani sekitar Hutan Harapan melakukan unjuk rasa di depan Kedutaan Inggris di tahun 2012. Mereka mengatasnamakan diri Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Serikat Tani Nasional/Partai Rakyat Demokratik (STN/PRD), menolak pemanfaatan Hutan Harapan sebagai kawasan REDD karena program ini hanya menguntungkan negara industri maju namun membunuh petani di negara miskin.⁵¹ Upaya kelompok tani ini mendapat dukungan dari Via Campesina. Organisasi ini menggambarkan dirinya sebagai 'sebuah gerakan internasional yang mengkoordinasikan organisasi petani produsen kecil dan menengah skala, pekerja pertanian, perempuan pedesaan, dan masyarakat adat.'⁵²

Dalam tuntutananya, petani mendesak Kedubes Inggris agar segera menekan PT REKI supaya melakukan *enclave* lahan milik masyarakat

⁴⁷ Selamatkan Hutan Harapan di Batanghari, *Suara Pembaruan*, 17 Maret 2011, h. 20.

⁴⁸ Saat Target Penurunan Emisi Tak Seiring Upaya, *Kompas*, 21 November 2012, h.24.

⁴⁹ Heidi Wittmer and Regina Bitmer, *op.cit.*

⁵⁰ Myrna Safitri, "Penguasaan dan Konflik Sumber Daya Alam", dalam *Di Bawah Satu Payung Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Harijadi Kartodiharjo dkk (penyusun), Jakarta; Yayasan KEHATI, 2005, h.92-106.

⁵¹ REDD Akan Menggusur Petani, *PosMetro Jambi*, 25 Juni 2010, h.1.

⁵² Carbon Hopes and Landless Farmers in Indonesia and Malaysia, 03 November 2009, <http://forestclimatecenter.org/posting.php?International&lang=English&nID=45>.

Kunungan Jaya seluas 7.975 ha dan menghormati kedaulatan bangsa Indonesia dan menyerahkan sejumlah dokumen berupa peta dan bukti-bukti kepemilikan lahan masyarakat kepada pihak perwakilan Kedubes Inggris.⁵³ Mereka menuntut peninjauan ulang lahan konsesi PT REKI karena dianggap menimbulkan konflik agraria. Belum adanya persepsi yang sama dalam masalah ini juga dapat berujung pada sengketa agraria. Hal ini terjadi karena belum adanya Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak adanya *ground check* dalam penetapan kawasan hutan, sehingga terdapat desa yang masuk kedalam wilayah HTI.⁵⁴ Posisi Pemerintah dan Dinas terkait di daerah dianggap ambigu dan tidak melindungi rakyat, karena masalah ini dianggap sebagai urusan perusahaan pengelola hutan.⁵⁵ Penyelesaian masalah terkait sengketa agraria ini tidak kunjung mendapat penyelesaian sehingga menjadi beban tersendiri dalam pelaksanaan restorasi ekosistem di Indonesia. Oleh karena itu pelaksanaan konsep konservasi yang berlaku secara internasional perlu beradaptasi dan diselaraskan dengan adat dan hukum ulayat yang berlaku di Indonesia. Perlu ada sosialisasi terhadap masyarakat tentang upaya restorasi ekosistem ini, karena pada dasarnya rakyat tidak menolak program restorasi tersebut.

PT REKI menilai, tindakan masyarakat tersebut merupakan upaya perlawanan terhadap instruksi gubernur dan pemerintah. PT REKI menyerahkan sepenuhnya masalah konflik agraria ini kepada pemerintah karena kawasan Hutan Harapan milik negara. Dilain pihak PT REKI sebagai pengelola Hutan Harapan juga dianggap kurang mampu menjalin komunikasi dengan LSM setempat, cenderung bersikap tertutup dan program kerja kurang tersosialisasi kepada masyarakat.

⁵³ Ratusan Petani Jambi Geruduk Kedubes Inggris dan Malaysia, <http://www.berdikarionline.com/kabar-rakyat/20121203/ratusan-petani-jambi-geruduk-kedubes-inggris-dan-malaysia.html#ixzz2sQtmPEcS>, diakses 5 Februari 2014.

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Zaenal Arifin, Kasubdit Pengembangan Ekonomi Bappeda Provinsi Jambi, tanggal 25 Juli 2011.

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Aidil Putra, Ketua Persatuan Petani Jambi pada tanggal 24 juli 2011.

Konsep konservasi *unsich* yang dilaksanakan PT REKI adalah memulihkan kondisi hutan seperti semula baik biotik maupun abiotik, merupakan pelaksanaan konsep konservasi global yang berakar di negara-negara Barat dimana hutan diperuntukan bagi kepentingan hutan itu sendiri berikut flora dan fauna yang ada didalamnya, dan tidak mengakui keberadaan manusia untuk tinggal dan hidup di dalam hutan konservasi tersebut.⁵⁶ Pengelola Hutan Harapan meyakini hutan dan ekosistem alam yang pernah terganggu akibat aktivitas produksi dan pembalakan bisa memulihkan diri secara alami. Hanya ada satu syarat pokok agar pemulihan tersebut bisa berlangsung dengan baik, yaitu kawasan tersebut tidak terganggu untuk waktu yang lama. Akan tetapi idealisme ini sulit terlaksana karena telah ada penduduk yang mendiami wilayah konsesi mereka.

Menteri Kehutanan Zulkifli melakukan peninjauan langsung ke Hutan Harapan menyusul terjadinya perusakan tersebut.⁵⁷ Konflik petani dan PT REKI berhasil diredam namun hal tersebut tetap menjadi masalah potensial yang akan selalu mengganggu pelaksanaan konservasi di Hutan Harapan. Upaya PT REKI melakukan konservasi Hutan Harapan masih selalu terbentur dengan aksi perambah hutan, pembalakan liar dan penggarapan lahan. PT REKI tidak sanggup mengatasi hal ini dan berharap kementerian Kehutanan dapat secepatnya mengatasi masalah perambahan hutan dan penggarapan lahan di Hutan Harapan. Konservasi Hutan Harapan hanya akan bertahan selama Pemerintah Jambi dan Kementerian Kehutanan mendukung upaya penuh upaya restorasi ekosistem di Hutan Harapan.⁵⁸

VII. PENUTUP

Keanekaragaman hayati merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang berguna bagi kehidupan manusia. Punahnya

⁵⁶ Wawancara dengan Desri Erwin, Spesialis Kemitraan Para Pihak PT REKI pada tanggal 24 Juli 2011

⁵⁷ Amankan Hutan Harapan dari Perambah, *Media Indonesia*, 23 November 2012, h. 15.

⁵⁸ "Hutan Harapan Yang Makin Hancur", *Suara Pembaruan*, 2 Februari 2013, h.15.

keanekaragaman hayati merupakan kerugian besar bagi seluruh umat manusia. Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menjadi kewajiban global. Para aktor internasional di bidang lingkungan hidup secara aktif bekerja melaksanakan gerakan konservasi global. Aktor internasional yang paling efektif dalam melakukan kegiatan ini adalah LSM dan para tokoh masyarakat internasional yang berperan sebagai individu pro kelestarian lingkungan. Perbedaan kepentingan dengan masyarakat lokal di negara-negara berkembang menyebabkan munculnya penolakan lokal terhadap konservasi global.

Para aktor internasional, khususnya LSM dan tokoh masyarakat internasional, merupakan penggerak utama yang sangat efektif dalam membangun konservasi ekosistem di Hutan Harapan. Mereka menjadi kelompok kepentingan khusus (*special interest group*) yang justru dalam banyak hal menjadi penentu arah kebijakan. Secara formal kelompok ini memang berkaitan erat dengan kepentingan-kepentingan internasional, atau dalam hal ini gerakan konservasi global. Pemerintah Indonesia tidak mampu menahan desakan kepentingan konservasi dari para aktor internasional tersebut. Hal ini disebabkan Indonesia memang membutuhkan bantuan internasional untuk menjaga kelestarian hutannya. Namun dilain pihak Indonesia masih mempunyai banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan terkait konflik agraria yang ada di kawasan Hutan Harapan. Hal ini memunculkan penolakan masyarakat setempat terhadap Hutan Harapan, dan dalam perkembangan mengganggu keberhasilan pelaksanaan restorasi ekosistem di Hutan Harapan tersebut.

V. REKOMENDASI

Kerja sama internasional dalam bidang konservasi yang dilakukan Indonesia harus dikembangkan dengan penyesuaian dan penghormatan kepada nilai budaya masyarakat setempat. Harus ada persamaan persepsi diantara semua pihak, baik asing yang ingin membantu,

instansi terkait dan penduduk asli agar upaya restorasi ekosistem dapat terus berjalan tanpa merugikan pihak manapun. Pembangunan kawasan konservasi tanpa mempertimbangkan kebutuhan aspirasi dan hak penduduk setempat akan menciptakan masalah sosial yang tak terselesaikan dan mengancam manfaat jangka panjang kawasan konservasi. Hal pertama yang harus dilakukan Pemerintah untuk mengatasi masalah ini segera menyelesaikan tata ruang dan tata wilayah di Indonesia, terutama di wilayah konservasi yang selama ini masih menimbulkan konflik di berbagai daerah.

Kawasan konservasi Hutan Harapan yang menyimpan banyak kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia mengundang banyak peneliti asing untuk datang melakukan penelitian. Dalam hal ini Dinas Kehutanan /BKSDA maupun pengelola Hutan Harapan tetap perlu melakukan pengawasan secara ketat demi menghindari kemungkinan pencurian plasma nutfah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adiotjondro, George J. *Pola-Pola Gerakan Lingkungan –Refleksi untuk Menyelamatkan Lingkungan dari Ekspansi Modal*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003.
- Alikodra, Hadi S., *Tehnik Pengelolaan Satwa Liar dalam Rangka Mempertahankan Keanekaragaman Hayati di Indonesia*, Bogor; IPB Press, 2010.
- Attfield, Robin., *Etika Lingkungan Global*, (terjemahan Saut Pasaribu), Jogjakarta; LKPM, 2010.
- Baylis, John dan Steve Smith, *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. UK; Oxford University Press, 1999

- Banyu Perwita, Anak Agung dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Hubungan Internasional*, Bandung; Remaja Rosdakarya, 2005.
- Colchester, Marcus., *Menyelamatkan Alam – Penduduk asli Kawasan Perlindungan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati*, Jakarta, WGCOP – Walhi, 2009
- Henderson, Conway W. 1998. *International Relations, Conflict and Cooperation at the Turn of the 21st Century*, McGraw-Hill International Editions, 1998.
- Held, David., *Democracy and the Global Order*, California:Stanford University Press, 1995
- Heater, Derek., *Historical Pattern, dalam World Citizenship: Cosmopolitan Thinking and Its Opponents*. London: Continuum, 2002.
- Indrawan, Mochamad dkk, *Biologi Konservasi* Jakarta; Yayasan Obor, 2007.
- Kartodiharjo, Harijadi. dkk (penyusun), *Di Bawah Satu Payung Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Jakarta; Yayasan KEHATI, 2005
- Kemf, Elizabeth. (ed.), *Indigenous Peoples and Protected Areas-The Law of Mother Earth*, London, Earthscan, 1993.
- Jackson, Robert dan Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, (terjemahan Dadan Suryadipura), Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2005
- Mackinnon, John. dkk, *Pengelolaan Kawasan yang Dilindungi di Daerah Tropika*, Yogyakarta, UGM Press,1990.
- Minix, Dean A. and Hawley, Sandra M. *Global Politics*, West/Wadsworth,1998.
- Pramudianto, Andreas *Diplomasi Lingkungan Teori dan Fakta*, Jakarta, UI-Press, 2008
- Papp, Daniel S., *Contemporary International Relations – Frameworks for Understanding*, Boston; Allyn and Bacon,1997.
- Sitepu, P. Anthonius. 2011. *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Shoelhi, Mohammad., *Diplomasi –Praktik Komunikasi Internasional*, Bandung; Remaja Rosdakarya, 2011.
- Supriatna, Jana., *Melestarikan Alam Indonesia*, Jakarta; Yayasan Obor, 2008.
- Wittmer, Heidi and Regina Bitmer, *Between Conservationism, eco-populism and developmentalism – Discourse in Biodiversity Policy in Thailand and Indonesia*, CAPRI Working Paper No.37, Washington DC: International Food Policy Research Institute.
- Yakin, Addinul., *Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1997.

Artikel dalam Internet

- Assessing Five Years of CEPF Investment in the Sumatra Forest Ecosystem in Sumatra Forest Ecosystem of the Sundaland Biodiversity Hotspot, <http://www.cepf.net/documents/final.bahasa.sundaland.sumatra.ep.pdf>, diakses 4 Februari 2014
- Birdlife International http://www.birdlife.org/worldwide/index.html?gclid=CLqgx_aIILMCFQob6wod_1oADQ, diakses 22 Oktober 2012.
- Carbon Hopes and Landless Farmers in Indonesia and Malaysia, 03 November 2009 <http://forestclimatecenter.org/posting.php?International&lang=English&nID=45Group/EU-CLG.aspx>, diakses 20 Juni 2014.
- Habitat Terusik Burung Terancam, <http://www.kicaumania.org/forums/archive/index.php/t-48571.html>. diakses 15 Februari 2011
- Hutan Harapan Jadi Pusat Riset Internasional, 23 Oktober 2013, <http://www.antaranews.com/berita/401719/hutan-harapan-jadi-pusat-riset-internasional>, diakses 19 Juni 2014.
- Indonesia - Inggris Kerjasama Perubahan Iklim, http://www.infogate.com/viewstory/2008/12/22/indonesia_inggris_kerjasama_perubahan_iklim/?url=InfoHarapanRainforest, www.nabu.de/downloads/Info_harapan_rainforest.pdf, diakses 19 Juni 2014.

- Masyarakat Rambah 7.000 ha Kawasan Hutan Harapan Rainforest Jambi 3-Nov-2008, <http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=4&jd=Masyarakat+Rambah+7.000+ha+Kawasan+Hutan+Harapan+Rainforest+Jambi&dn=20081103112051#>
- Moratorium rentan konflik. 16 Februari 2011. http://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?p=show_detail&id=3426 Our Common Future, http://conspect.nl/pdf/Our_Common_Future-Brundtland_Report_1987.pdf, diakses 4 Februari 2014.
- Pangeran Charles Dukung Restorasi Ekosistem di Indonesia, <http://www.antaraneews.com/print/122413/>, diakses 11 Februari 2014.
- Renstra-TFCA-Sumatera-2010-2015, <http://tfcasumatera.org/wp-content/uploads/2014/01/Renstra-TFCA-Sumatera-2010-2015-Inal.pdf>, diakses 4 Februari 2014.
- Ratusan Petani Jambi Geruduk Kedubes Inggris dan Malaysia, <http://www.berdikarionline.com/kabar-rakyat/20121203/ratusan-petani-jambi-geruduk-kedubes-inggris-dan-malaysia.html#ixzz2sQtmPEcS>, diakses 5 Februari 2014.
- SIARAN PERS No.: S.287/II/PIK-1/2006, <http://www.dephut.go.id/index.php/news/details/1812>,
- Tanggapan PERSAKI dalam ‘Kampanye Hitam’ Indonesia Sebagai Perusak Hutan Terbesar di Dunia, 05-06-2007, <http://www.dephut.go.id/index.php/news/details/2668>, diakses 19 Juni 2014.
- The Prince of Wales’s Corporate Leaders Group www.cisl.cam.ac.uk/Business-Platforms/The-Prince-of-Wales-Corporate-Leaders-
- Majalah**
 CIFOR dan Indonesia Kemitraan untuk Hutan dan Masyarakat, CIFOR, Maret 2012.
 Hutan Harapan Jambi di Majalah GATRA edisi 29 (28 Mei – 3 Juni 2009).
- Sejarah Harapan Rainforest, *Kato Kito*, Berita Berkala Harapan Rainforest, edisi 1-tahun I/2011, Jambi, REKI; 2011
- Dokumen**
 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam.
 UU No. 5 tahun 1994 tentang Keanekaragaman Hayati UNEP, “the State of the Global Environment”, *Our Planet*, 4.2, 1992.
- Surat Kabar**
 Keanekaragaman Hayati Turun”, Kompas, 29 November 2013.
 Populasi Satwa Liar di Sumatera terus Menyusut”, Media Indonesia, 15 Maret 2014.
 REDD Akan Menggusur Petani, PosMetro Jambi, 25 Juni 2010.
 Selamatkan Hutan Harapan di Batanghari, Suara Pembaruan, 17 Maret 2011.
 Saat Target Penurunan Emisi Tak Seiring Upaya, Kompas, 21 November 2012.
- Wawancara Nara Sumber**
 Bapak Desri Erwin, Spesialis Kemitraan Para Pihak PT REKI pada tanggal 24 Juli 2011
 Bapak Agus Budi Utomo, Managing Director LSM Burung Indonesia tanggal 27 Juli 2011
 Bapak Rudiansyah Wakil Deputy Ketua dan Bapak Farid manager SDM Walhi Jambi pada tanggal 24 Juli 2011.
 Bapak Zaenal Arifin, Kasubdit Pengembangan Ekonomi Bappeda Provinsi Jambi, tanggal 25 Juli 2011.
 Bapak Aidil Putra, Ketua Persatuan Petani Jambi pada tanggal 24 Juli 2011.
 Bapak Farid Koordinator proyek /Partnership, Bapak Robert Manager SDM Bapak Rahmat Direktur LSM WARSI pada tanggal 26 Juli 2011.